

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Ponorogo disebut juga Kota Reyog atau Bumi Reyog karena daerah ini merupakan asal muasal Kesenian Reyog. Menurut (Rohim et al., 2023) Reyog Ponorogo merupakan pertunjukan budaya yang terkenal di Indonesia dan tingkat internasional. Reog merupakan tarian adat yang menjadi identitas inti Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur. Lahir sejak tahun 1235M pada mulanya Reog Ponorogo merupakan kisah yang didongengkan di dalam istana, namun menyebar ke masyarakat dan masyarakat sangat menyukainya, sejak itulah kesenian Reog Ponorogo berkembang . Kesenian Reog Ponorogo sampai saat ini dapat dijumpai pada acara adat maupun festival. Dilihat dari segi waktu dan model pertunjukan, reog mengalami banyak perubahan. Reog atau Reyog berasal dari kata (riyet) atau dapat diartikan sebagai keadaan bangunan yang hamper rubuh, karena di dalam pertunjukan reog terdapat suara gamelan atau music pengiring yang menyerupai (bata rubuh) yang artinya sangat semarak dan ramai (Turhumawati, 2008). Kecamatan Sumoroto dianggap masyarakat Ponorogo sebagai tempat berdirinya pusat Kerajaan Bantarangin, yaitu merupakan salah satu kerajaan yang dianggap sebagai tempat asal-usul reog Ponorogo.

Kecamatan Sumoroto bagi sebagian masyarakat Ponorogo adalah tempat yang sakral karena ada anggapan dahulu berdiri pusat Kerajaan Bantarangin. Sejarah Reog Ponorogo ini awal mulanya berasal dari cerita rakyat yang memiliki berbagai macam versi. Secara garis besar, di Ponorogo paling tidak dikenal tiga

versi utama kisah asal-usul Reog Ponorogo, yaitu versi Bantarangin, versi Ki Ageng Kutu Suryangalam, dan versi Batara Katong. Salah satu versi sejarah Reog Ponorogo adalah versi Bantarangin yang menampilkan aksi teaterikal Kerajaan Bantarangin yang mementaskan kisah cinta Raja Kelono Sewandono dengan Putri Dewi Songgolangit Kerajaan Bantarangin adalah cerita rakyat yang digunakan dalam naskah pementasan Reog Ponorogo dan dijadikan media pembelajaran tentang asal-usul kesenian Reog Ponorogo yang mendunia. Dengan seserahan yang diminta Dewi Songgolangit sehingga terciptanya kesenian Reog Ponorogo (Andini Idhad et al., 2022).

Patung dan monumen dibangun di kota, menggambarkan tokoh-tokoh seni Reyog yang menjadi sumber pembelajaran tentang sejarah lokal dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini ditemukan bahwa berkembang menjadi salah satu target utama pertunjukan seni di Indonesia. Reog Ponorogo telah menjadi bahasa Indonesia yang penting pada awalnya menunjukkan bahwa memperoleh cinta yang kuat dari wisatawan internasional dan lokal. Seperti yang ditunjukkan, Reog Ponorogo merupakan perwujudan sejarah dan budaya Indonesia dan lebih tinggi lagi layak untuk didaftarkan sebagai salah satu warisan Dunia UNESCO. Sehingga dalam menjaga kebudayaan yang ada dan untuk mengingatkan akan sejarah dan simbol sebuah kota maka Pembangunan seperti monument dan patung sangat penting untuk mengenang dan supaya Masyarakat tidak meninggalkan sebuah kebudayaan yang ada.

Pembangunan adalah salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menunjang pendapatan negara dan mengimplementasikan

Undang-Undang yang ada. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga melibatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, oleh karena itu penting untuk melakukan pembangunan yang menjunjung tinggi kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hubungan antara gender dan pembangunan telah menjadi topik yang semakin diperdebatkan dalam lingkup politik dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu makro, sektoral, dan regional (Mahardhani, 2017). Pada tingkat regional, pembangunan dilakukan di daerah-daerah seperti kabupaten atau kota. Namun, implementasi pembangunan di setiap daerah tidak selalu berjalan dengan lancar dan menghadapi beberapa kendala. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan memerlukan kerjasama dengan instansi lain di sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara daerah menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kendala-kendala dan memperbaiki kelancaran pembangunan tersebut.

Pola sinkronisasi yang berbentuk kerjasama antar instansi pemerintahan sekarang sedang berkembang antara pemerintahan di kabupaten dan di desa satu dengan yang lain (Husna, 2020). Pembangunan di daerah harus dilakukan dengan kerja sama antar instansi atau perangkat pemerintahan lainnya, kerja sama harus dilakukan guna bisa terciptanya pembangunan yang terlaksana dengan baik dan

hasil yang baik untuk Pembangunan di daerah. Melalui pola jejaring, kerjasama di antara subyek pembangunan mulai banyak dilakukan. Kerja sama yang dilakukan pemerintah dan pemerintah disekitaran Pembangunan harus dijalankan dikarenakan faktor yang mempengaruhi Pembangunan harus dilaksanakan untuk Pembangunan yang berhasil dan mencapai misi suatu Pembangunan tersebut.

Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya melakukan sebuah terobosan dengan menciptakan kebijakan mengenai proyek strategi nasional, yang sudah dilakukan sejak periode pertama menjabat. Proyek strategi nasional ini dibuat untuk menciptakan Pembangunan yang merata dan juga untuk mengelompokkan Pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan target atau visi misi Presiden Joko Widodo. Pembangunan dipahami sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (Fauziyah & Arif, 2021). Pembangunan yang dilakukan di proyek strategis nasional bukan hanya pembangunan jalan ataupun bangunan gedung instansi namun juga Pembangunan yang membantu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pembangunan tempat wisata baru dan juga Pembangunan yang membantu menunjang daerah agar berkembang sehingga daerah bisa fokus dalam pengajuan pengembangan Pembangunan sesuai dengan kriteria proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo termasuk Pembangunan tempat wisata yang mengundang wisatawan untuk menunjang pemasukan daerah dan APBD daerah bisa meningkat sehingga tempat wisata yang mempunyai ciri khas.



Gambar 1.1 Data proyek strategis nasional di Jawa Timur (2023)

Sumber : <https://sinfra.jatimprov.go.id/dashboard>

Berdasarkan gambar diatas maka bisa disimpulkan bahwa Pembangunan yang ada di Jawa Timur masih memprioritaskan Jalan dan jembatan dengan presentase 34,09% dikarenakan jalan dan jembatan sebagai penghubung kehidupan ekonomi dan wisata sebagai penunjang peningkatan ekonomi di Jawa Timur, selain itu di nomor dua baru terdapat pariwisata dengan presentase 18,18% sebagai tujuan utama gubernur jawa timur dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui wisata dalam hal ini wisata juga dimasukan dalam proyek startegis nasioal dikarenakan Pembangunan disektor pawisata sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyakat dan juga untuk memberikan kenaikan pendapatan daerah sehingga suatu daerah bisa berkembang melalui pembanguan wisata ini. Maka dari itu pemerintah provinsi jawa timur sangat berfous dalam Pembangunan jalan dan juga wisata dikarenakan dua hal itulah yang bisa membantu dalam hal ekonomi dan masyarakt juga bisa terdampak dalam hal segi pendapatan dan umkm juga terbantu, dalam data diatas proyek yang dimasukan dalam Perpres Proyek strategis nasional dalam Kawasan lingkat wilis memilki

jumlah 44 dikarenakan Kawasan inilah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah maka dari itu Pembangunan dalam hal wisata dan jalan harus diperhatikan dikarenakan menjadikan jalur khusus sehingga dalam hal ini proyek monument reog ponorogo yang digagas oleh pemerintah ponorogo juga masuk dalam proyek strategis nasional dikarenakan sudah memenuhi kriteria didalam perpres karena masuk dalam Kawasan lingkaran wilis.

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menganggap penting untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, pada tanggal 8 Januari 2016, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam proses implementasi Perpres ini dijelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional merujuk pada proyek yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan meratakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

Implementasi ialah suatu peristiwa aktivitas dalam menghantarkan kebijakan untuk masyarakat yang kebijakan tersebut juga dapat membawakan sebuah hasil sebagaimana mestinya didapatkan (Fauzi, A, 2019). Proses pada implementasi kebijakan bukan hanya mengenai perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program serta memunculkan ketaatan pada diri kelompok, melainkan juga menyangkut pada jaringan kekuatan ekonomi,

politik serta sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dan bisa mempengaruhi perilaku seluruh pihak terkait untuk menetapkan arah tujuan kebijakan public agar dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah (Abdul Wahab, 2005). Sedangkan menurut Menurut Waluyo dalam (Fahri, 2014), menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, keputusan tersebut mengenali masalah yang hendak diselesaikan, dengan menyebutkan secara tegas tujuan yang akan dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Implementasi program ini bertujuan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dengan perkembangan Pembangunan yang merata pada setiap sektor ekonomi.

Dalam implementasi kebijakan pembangunan proyek strategis nasional ini juga turut membangun potensi wisata yang ada daerah dikarenakan peranan penting hal ini juga terkait dengan perkembangan di negara dan pertumbuhan ekonomi. mempengaruhi perekonomian nasional. Memanfaatkan pengembangan di sektor Pariwisata adalah salah satu industri terkemuka di negara ini mulai dari berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, lingkungan, masyarakat sebagai penggerak perekonomian negara.

Tujuan Pariwisata sendiri meliputi dua jenis yaitu destinasi wisata alam dan destinasi wisata-wisata buatan. Destinasi wisata alam ini memanfaatkan kekayaan alamnya secara maksimal hal-hal yang sudah ada sejak lama, seperti gunung, pantai, hutan, dan danau. namun destinasi wisata buatan adalah tempat wisata

yang dibangun atau dibangun secara sadar (Kewuel et al., 2022). Fungsi kepariwisataan yang demikian ternyata di dalam perakteknya dapat dikembangkan di dalam berbagai peranannya dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Di antaranya, pariwisata berperan di dalam peningkatan ekonomi keluarga, kelompok usahawan, lebih-lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bidang pariwisata berdampak amat signifikan di dalam perekonomian negara. Selain itu, pariwisata berperan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wisata pendidikan baik domestik maupun mancanegara, akan meningkatkan pemahaman pelakunya di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman atas peristiwa masa lalu, sejarah, kepurbakalan dan sebagainya. Semuanya akan menambah wawasan dan memberi pencerahan yang optimal kepada pelakunya (Karim, 2019).

Pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan data menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada 218 Proyek yang akan dikerjakan di tahun 2023 dibanding dengan tahun tahun sebelumnya, proyek yang ada di tahun 2023 lebih banyak dikarenakan komitmen dari Gubernur Jawa Timur dalam percepatan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid 19 terus disebut. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Pembangunan pada tahun 2023 di Jawa Timur diarahkan ke pemulihan ekonomi, Pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan, dan juga Pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi pelayanan dasar Kesehatan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan

yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Bruto et al., 2018). Pembangunan yang ada di Jawa Timur belum merata dengan apa yang masih tertinggal, selain itu pemerintah Jawa Timur dalam menjalankan pembangunan bukti dari implementasi kebijakan yang dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan Masyarakat Jawa timur. Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Menurut dalam BPS Jawa Timur total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp. 294 triliun.

Dalam mesukseskan Pembangunan yang ada di Jawa Timur Gubernur Khofifah mengupayakan akan memasukan kedalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang berisikan Proyek startegis nasional yang diterbitkan Joko Widodo adalah tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (RI, 2019). Menurut Perpres ini, dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan

ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:

- a. Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;
- b. Kawasan Bromo – Tengger – Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
- c. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa akan dikategorikan Pembangunan yang ada di Jawa Timur sesuai dengan wilayahnya sehingga peran pemerintah provinsi bisa memanfaatkan Peraturan Presiden tersebut dengan mengajukan Pembangunan sesuai dengan target Pembangunan Gubernur Jawa Timur. Selain itu pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan apa yang akan dibangun di daerah mereka dengan mengajukan kepada Gubernur untuk dibantu dalam hal pendanaan dan bisa dibantu oleh pemerintah pusat dengan dimasukkannya proyek tersebut kedalam peraturan Presiden,

Seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo Seperti yang dilakukan pemerintah daerah Ponorogo yaitu Bupati Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang sedang menjabat sekarang ini, salah satu fokus beliau yaitu dalam menggiatkan pengembangan Pembangunan. Dalam pengembangan Pembangunan di Kawasan kabupaten yang dilakukan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini adalah pengembangan wisata alam yang dirancangkan sejak pertama kali beliau

menjabat sebagai bupati. Salah satu pengembangan wisata untuk meningkatkan peningkatakan daerah adalah dengan perencanaan Pembangunan wisata monument reog ponorogo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 3 tahun 2023 Tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025, dalam perda tersebut juga tertera dalam pasal 12 ayat 1 huruf C yang berbunyi KSPK Sampung dan sekitarnya, Pembangunan wisata reog ponorogo ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 dipilihnya monument reog ponorogo ini dikarenakan identitasnya Kabupaten Ponorogo adalah Reog itu sendiri dan untuk ikonik dan ciri khas suatu daerah sehingga dipilihnya Pembangunan monument Reog Ponorogo ini. Monumen Reog Ponorogo merupakan monument yang terletak di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam pernyataan Bupati Ponorogo dalam alesanya membangun monumen Reog Ponorogo :

“Kang Giri, sapaan akrab Bupati Ponorogo menjelaskan Reyog merupakan warisan leluhur yang sampai hari ini, masih hanya di tonton, di jogetkan, diagung-agungkan di elu-elukan tapi belum mampu diproyeksikan dalam konteks yang panjang, sehingga menjadi jaringan kota kreatif internasional. “Nah, itu kami terjemahkan dengan adanya monumen reyog diatas gunung, kemudian dibawahnya ada museum peradaban. Maka Reog mampu memberikan akselerasi ekonomi dan wisata,” terangnya. Ia menambahkan pada monumen tersebut nantinya mampu menyajikan kearifan masa lalu untuk masa depan yang gemilang. “Itu prinsipnya itu”.

Sumber: (<https://disbudparpora.ponorogo.go.id/hebat-monumen-reog-segera-dibangun/> diakses pada tanggal 21 oktober 2023)

Menurut Dinas Kebudayaan kepariwisataan Ponorogo dalam berita diatas Pembangunan wisata reog ponorogo ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 dipilihnya monument reog ponorogo ini dikarenakan identitasnya Kabupaten Ponorogo adalah Reog itu sendiri dan untuk ikonik dan ciri khas suatu daerah

sehingga dipilihnya Pembangunan monument Reog Ponorogo ini. Monumen Reog Ponorogo merupakan monument yang terletak di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Monumen reog Ponorogo memiliki ukurannya melebihi patung GWK di Bali. Monumen raksasa ini diproyeksi memiliki ketinggian 126 meter. Proyek tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 84 miliar yang akan dibangun di daerah tambang batu kapur yang ada di Kecamatan Sampung. Selain Monumen Reog, akan dibangun juga museum yang berada di bawah monumen reog. Serta nantinya akan dibangun wahana yang berfungsi sebagai penunjang wisata, serta area glamping dapat menjadi pusat edukasi cara pengolahan gamping yang dapat memiliki nilai jual. Bangunan monumen reog tersebut nantinya mampu menampung sebanyak 2.082 orang.

Pembangunan monumen reog ponorogo masuk dalam program prioritas yang direncanakan oleh Bupati Ponorogo, dalam Pembangunan Monumen Reog Ponorogo ini akan dimasukkan dalam proyek strategis nasional yang bisa dibantu dalam pendanaan oleh pemerintah pusat sehingga tidak mengandalkan dana APBD itu sendiri, dikarenakan dalam Pembangunan monument ini membutuhkan dana yang sangat besar sehingga membutuhkan bantuan dana dari *stakeholders* lainnya. Pembangunan monumen tidak hanya membangun patung saja namun ada museum peradaban Sejarah reog ponorogo sehingga bisa dijadikan sebagai wisata yang edukatif, misi dari bupati ponorogo sendiri adalah menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai kota wisata sehingga fokus dari Pembangunan di kabupaten ponorogo saat ini adalah di sektor pariwisata. Sektor pariwisata sebagai tujuan dari Bupati Ponorogo untuk meningkatkan pemasukan anggaran daerah sehingga

kedepannya bisa membuat ekonomi di Ponorogo meningkat dan bisa dilirik investor untuk turut membantu Pembangunan di daerah Ponorogo dikarenakan saat ini Ponorogo masih dibidang tertinggal dalam Pembangunan dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten tetangga.

Pembangunan monument Reog ini masih belum masuk dalam Proyek Nasional sehingga dalam pembangunannya masih mengandalkan dana daerah dan juga mencari investor sehingga pemerintah daerah masih mengupayakan untuk masuk dalam Proyek nasional seperti yang dikatakan oleh Bupati Ponorogo. Namun sampai saat ini Pembangunan Monumen Reog Ponorogo berhasil mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah yang senilai 30 Miliar komitmen yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur untuk memiliki monument yang identik di Jawa Timur adalah pencapaian yang besar karena untuk membantu pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Dalam Pembangunan monument Reog ini juga pemerintah menginginkan proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo langsung, pernyataan ini didukung langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah dalam wawancara :

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan mengupayakan pembangunan MRP menjadi proyek prioritas sehingga masuk naungan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019. Perpres itu mengatur percepatan pembangunan ekonomi kawasan sejumlah wilayah di Jatim bersama proyek Selingkar Wilis dan Jalur Lingkar Selatan (JLS).” Syaratnya Pak Bupati harus presentasi ke Bappenas dan MenkoPerekonomian untuk di-insert ke dalam perpres tersebut,”.

Sumber: (<https://ponorogo.go.id/2023/03/12/pembangunan-monumen-reog-dimulai-pemprov-upayakan-masuk-proyek-prioritas/> Diakses tanggal 29 September 2023)

Dalam Kawasan strategis nasional monument reog ponorogo bisa masuk dalam Kawasan lingkaran wilis Keberadaan Kawasan Selingkar Wilis sebagai kawasan pengembangan yang potensial di Provinsi Jawa Timur bagian barat, hal ini menjadi sangat serius untuk ditangani dan dikembangkan oleh masing-masing kabupaten yang dilaluinya, mimpi besar Provinsi Jawa Timur mengembangkan Kawasan Selingkar Wilis seperti halnya Kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten yang akan melaksanakan dan merasakan imbas dari pengembangan Kawasan Selingkar Wilis ini juga harus berbenah diberbagai sektor strategisnya. Sehingga dalam memasukan proyek monument reog ponorogo dalam prepres yang sudah diatur oleh Presiden sangat memungkinkan bisa jika peran pemerintah ponorogo bisa berjalan dengan baik dan serius maka monument reog ponorogo bisa masuk proyek strategis nasional dan bisa mendapatkan dana bantuan langsung oleh presiden dan bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan Pembangunan Monumen reog Ponorogo.

Monumen reog Ponorogo juga mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat dengan adanya kunjungan dari tim DPR RI yang diwakilkan oleh Fadli Zon sebagai ketua dari tim badan kerja sama antar parlemen dalam kunjungan Fadli Zon mengatakan dalam wawancaranya :

"Kami dukung terhadap peningkatan status Monumen Reog dan Museum Peradaban menjadi Proyek Skala Nasional (PSN), pentingnya memperkuat identitas nasional yang kaya akan warisan budaya di tengah arus globalisasi modern yang kian meluas," ujar Fadli Zon saat Kunjungan BKSAP Day di Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Penghargaan dan apresiasi diberikan oleh Fadli Zon kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo atas upaya besar yang diambil dalam pembangunan MRMP. Fadli Zon menekankan bahwa pembangunan seperti ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga

tentang warisan budaya yang harus dijaga dan dihargai. Lebih lanjut, ia berharap bahwa langkah positif ini bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.”

Sumber(<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45966/t/Tinjau+Monumen+Reog+dan+Museum+Peradaban+di+Ponorogo%2C+BKSAP+Dukung+Penguatan+Budaya+Nasional/> Diakses pada tanggal 7 November 2023)

Dalam kunjungan tim DPR RI menunjukkan bahwa monument reog ponorogo ini mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat, sehingga proyek monument reog ponorogo bisa mendapatkan bantuan dana ataupun bisa masuk dalam proyek strategis nasional dikarenakan sudah mendapatkan kunjungan khusus dari tim DPR RI dan juga dalam kunjungannya juga memberikan pernyataan bahwa memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan Pembangunan monument reog ponorogo karena memberikan bukti bahwa tentang adanya warisan budaya yang bisa diakui oleh daerah lain sebagai ciri khas dari Kabupaten Ponorogo. Ponorogo yang melakukan praktik pengembangan pariwisata melalui penguatan potensi pariwisata lokal yang dimiliki, Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Ponorogo sangat beragam, mulai dari : wisata budaya, religi, alam, gastronomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut (Ilmiah et al., 2021).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan perubahanterhadap keadaan (Asus et al., 2021). Pembangunan akan berhasil jika adanya kerjasama secara terarah dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan. Pembangunan ini dilakukan guna mensejahterakan masyarakat sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan untuk kehidupan yang tentram dan harmonis.



Gambar 1.2 Sosialisasi Bupati di Desa sampung
Sumber : Website BeritaJatim.com

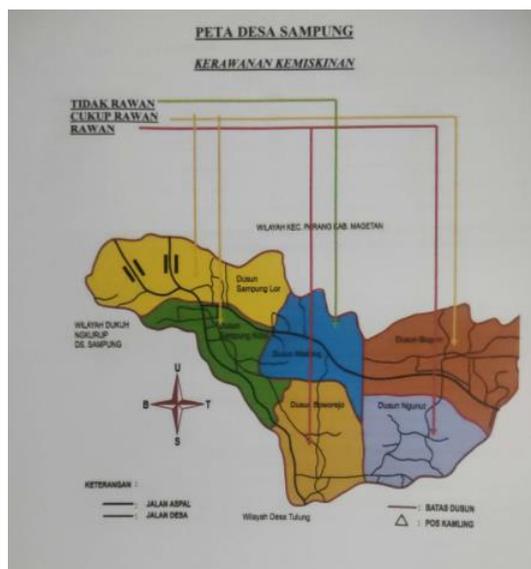
Pada gambar diatas menunjukkan Bupati Ponorogo turun langsung kepada Masyarakat untuk mensosialisasikan terkait Pembangunan monument reog ponorogo yang langsung dihadiri oleh Masyarakat desa Sampung yang secara tidak langsung terdampak pada Pembangunan monument reog Ponorogo. Dalam sosialisasi tersebut Bupati Ponorogo menjelaskan terkait Pembangunan monument reog dalam jangka panjang dan bagaimana peran Masyarakat dalam keikutsertaanya jika monument reog ponorogo ini sudah resmi dibuka untuk dijadikan objek wisata. Seperti halnya yang dikatakan Bupati Ponorogo dalam wawancaranya terkait nasib Masyarakat desa sampung dalam Pembangunan monument jangka panjang ini :

“Saya ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kepolisian dan TNI serta pemangku kepentingan lainnya, kita kumpulkan untuk melakukan musyawarah bersama. Kita ada gawe bersama untuk Ponorogo naik kelas," ungkap Sugiri, Rabu (19/10). Sugiri menjelaskan, bahwa pemilihan lokasi Monumen Reog di Gunung Gamping sudah dipikirkan dengan matang. Termasuk pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan pintu gerbang wisata di sisi barat laut Kabupaten Ponorogo dan berdekatan dengan

objek wisata Telaga Sarangan dan Tawangmangu. "Prinsipnya, wisata di Ponorogo kita bangun agar ada pemikat dan alasan kuat wisatawan harus mampir di Ponorogo," paparnya..berharap keberadaan monumen tersebut juga menjadi pengungkit sektor perekonomian serta Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Dampaknya nanti tentu kepada masyarakat sekitar ekonomi akan naik. Sedangkan terkait dengan para penambang agar dituntaskan dulu. Sehingga pembangunannya segera kongkrit dan klir," (<https://www.koranmemo.com/daerah/> Diakses pada tanggal 24 November 2023)

Pada informasi berita diatas Bupati Ponorogo juga menjelaskan terkait mengapa mengambil lokasi di Desa Sampung yang notabene adalah desa yang perbatasan dengan Kabupaten Magetan. Selain menjelaskan terkait alasannya memilih Desa Sampung Bupati juga menekankan bahwa nantinya Masyarakat akan mengalami dampak dari sektor pendapatan dikarenakan merekalah nantinya yang akan pertama kali membuka usaha Umkm yang terkait dengan monument reog ponorogo ini. Antusias dari Masyarakat juga mendukung dikarenakan harapan mereka dalam keikutsertaan proyek Pembangunan ini semakin jelas dikarenakan Bupati juga yang turun langsung dalam menejelaskan terkait posisi Masyarakat yang terdampak kedepanya bagaimana dan supaya menjadi kejelasan dikalangan Masyarakat. Dalam pernyataan Bupati juga terdapat penyelesaian terkait pekerja tambang yang sampai saat ini masih bekerja di area proyek Pembangunan dikarenakan belum adanya kejelasan dari pemerintah ponorogo maka dari itu pekerja tambang masih terus melakukan pekerjaan mereka, namun dalam acara sosialisasi yang dilakukan Bupati Ponorogo pekerja tambang ini mendapatkan kejelasan dikarenakan komitmen dari Bupati dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pembangunan monument ini aka diselesaikan sebelum Pembangunan monument ini sudah diresmikan.

Namun apa yang ditemui peneliti dalam melakukan survey tempat lokasi penelitian ditemukannya bahwa Bupati Ponorogo hanya melakukan sosialisasi kepada Masyarakat satu kali sejak monument ini pertama kali dimulai pembangunannya sehingga Masyarakat sampai saat ini masih khawatir akan kepastiannya dalam komitmen dari Bupati tersebut selain itu pekerja tambang yang saat sosialisasi dijanjikan menjadi khawatir akan hak nya dikarenakan sampai saat ini masih belum adanya kejelasan terkait kelanjutan acara sosialisasi tersebut dikarenakan belum diadakanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten ponorogo.



Gambar 1.3 Batas wilayah Desa Sampung
Sumber : Pemerintah Desa Sampung

Jika dilihat dari gambar diatas, maka dalam pemelihan lokasi monumen reog ponorogo ini Pemerintah Ponorogo juga melihat kondisi geografis suatu daerah dan juga melihat potensi wisata yang ada sehingga dalam hasil akhir perumusan kebijakan terkait monument reog ponorogo ini akhirnya memilih untuk dibangun di Desa Sampung Kecamatan Sampung. Kondisi geografis Desa

sampung terdapat di Kawasan pegunungan yang dilalui oleh jalur antar kabupaten Ponorogo dan Magetan sehingga menjadi jalur utama penghubung antar kabupaten tersebut, selain itu di Desa sampung juga dikuasai oleh adanya tambang kapur yang satu satunya di Kabupaten Ponorogo sehingga menjadi salah satu mata pencarian Masyarakat setempat oleh karena itu prouden utama atau pendapatan utama desa sampung ada di tambang kapur tersebut.

Desa Sampung juga termasuk dalam wilayah lingkaran wilis dikarenakan keberadaannya sejajar dengan gunung lawu yang ada di Kabupaten Magetan selain itu juga Desa sampung jika ditarik lurus ke sebelah utara akan bertemu wilayah wisata telaga sarangan yang sekarang menjadi obyek utama wisata didaerah Jawa Timur. Maka dari itu pemelihan tempat di Desa Sampung difaktori juga dengan kedekatannya wilayah ini dengan telaga sarangan dikarenakan masih menjadi satu jalur utama menuju tempat wisata tersebut, sehingga nantinya wisatawan selain akan berkunjung ke telaga sarangan akan berpotensi besar melirik monument reog ponorogo yang akan mereka lewati.

Dikarenakan mayoritas Desa Sampung adalah tambang kapur maka sangat berpotensi untuk dibangun sebuah monument dikarenakan sudah banyaknya tambang kapur yang terbengkalai dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dibangun sebuah monumen reog ponorogo, Selain Desa Sampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan yang juga berdekatan dengan telaga sarangan Desa Sampung juga berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri yang berada disebalah barat Kecamatan Sampung sehingga dalam pemilihan lokasi dinilai sangat strategis untuk menggaet wisatawan dari luar kota dikarenakan letak

monument yang langsung berbatasan dengan kabupaten wonogiri dan kabupaten magetan sehingga mudahnya akses untuk menuju monument ini sudah dilewati jalur antar provinsi sehingga jalan yang relative besar dan bagus dan selain itu juga menjadi kecamatan penghubung utama antar provinsi jawa timur dan jawa Tengah.

“Dengan telah ditetapkannya Perda tersebut, akan mendukung interkoneksi regulasi dalam kerangka penajaman arah pembangunan Kabupaten Ponorogo, khususnya di sektor kepariwisataan yang terwujud dalam Grand Design Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Ponorogo,” ujar Bupati Sugiri saat sambutan. Menurut Bupati Sugiri, dengan mengidentifikasi potensi objek wisata daerah, Pemkab Ponorogo akan dapat menentukan arah pengembangan potensi objek wisata dan positioning objek wisata di daerah. Salah satunya dengan pembangunan Monumen Reog. “Ripparkab ini akan memberikan arahan pengembangan wisata di Kabupaten Ponorogo agar dapat mendukung terlaksananya pembangunan wisata yang berkesinambungan dan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo,” jelasnya. (<https://pdiperjuangan-jatim.com/sah-ponorogo-punya-perda-pengembangan-potensi-wisata/> Diakses pada tanggal 18 Desember 2023)

Pada pernyataan di atas bahawa Pembangunan monument reog ponorogo ini juga sudah termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 3 tahun 2023 Tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025, dalam perda tersebut juga tertera dalam pasal 12 ayat 1 huruf C yang berbunyi KSPK Sampung dan sekitarnya yang Dimana pada monument reog ponorogo ini sudah mempunyai landasan hukum dan juga sudah sesuai dengan visi misi dari bupati ponorogo yang berfokus pada pengembangan wisata di ponorogo dan dalam pemilihan di Desa Sampung sudah tertera dalam perda tersebut dikarenakan daerahnya yang berpotensi menjadi obyek wisata dikarenakan letak desa yang berdekatan dengan kota lainnya.

Jika dilihat dari letak geografis maka monument reog ponorogo ini sangat strategis jika dibangun di Desa Sampung dikarenakan letaknya yang sebagai penghubung antar wisata telaga sarangan dan tawamangu yang banyaknya wisatawan dengan mudah mengetahuinya, di sisi lain pemerintah ponorogo juga akan bisa memasukan proyek ini dalam proyek strategis nasional dalam lingkaran wilayah sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dikarenakan letaknya yang sesuai dengan lingkaran wilayah yang ada sehingga target dari Bupati ponorogo dalam mendapatkan dan dari pemerintah pusat bisa tercapai sehingga Pembangunan monument ini tidak mengalami penghambatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana implementasi Kebijakan Pembangunan Monument Reog Ponorogo Berskala Nasional di Kabupaten Ponorogo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menunjukkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan Monument Reog Ponorogo Berskala Nasional di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan baru dan pengalaman bagi penulis sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya. . Selain itu, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintahan (Desa Sampung dan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo)

Menjadi bahan diskusi, referensi dan bisa dijadikan sebagai koreksi terhadap program-program kebijakan dan dapat digunakan untuk pertimbangan dalam merumuskan rancangan kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa terkait implementasi kebijakan serta untuk menambah referensi perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Ponorogo dapat mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah desa Sampung dalam Pembangunan monument reog ponorogo.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep teori advokasi kebijakan pemerintah desa kepada Masyarakat. Konsep teori advokasi kebijakan

tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Monument Reog Ponorogo di Kabupaten Ponorogo